

TESIS

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM IDENTIFIKASI JENAZAH YANG
TIDAK DIKENAL**



FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM IDENTIFIKASI JENAZAH YANG
TIDAK DIKENAL**

TESIS

Program Studi Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

ABSTRAK

Identifikasi jenazah yang tidak dikenal merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak atas identitas dan kepastian hukum bagi keluarga serta penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Proses tersebut melibatkan berbagai instansi dengan kewenangan yang berbeda, sehingga memerlukan dasar hukum, koordinasi, dan mekanisme pelayanan yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab pemerintah dalam identifikasi jenazah yang tidak dikenal, pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses identifikasi jenazah dan administrasi kematian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab pemerintah dalam identifikasi jenazah yang tidak dikenal telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia, kesehatan, hukum pidana dan hukum acara pidana, administrasi kependudukan, serta pelayanan publik. Perkembangan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan telah memperkuat kerangka pengelolaan kesehatan secara terpadu dan pembagian tanggung jawab dalam kondisi bencana, termasuk identifikasi korban meninggal akibat bencana. Namun, masih terdapat fragmentasi pengaturan dan kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*), terutama mengenai identifikasi jenazah tidak dikenal pada kondisi non-bencana. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah telah dilakukan oleh Kepolisian, fasilitas pelayanan kesehatan, instansi administrasi kependudukan, dan instansi terkait lainnya, tetapi masih menghadapi kendala dalam koordinasi lintas sektor dan kesinambungan proses identifikasi hingga penyelesaian administrasi kematian. Faktor yang memengaruhi meliputi faktor yuridis berupa fragmentasi dan kesenjangan pengaturan, faktor sosial berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, kondisi keluarga, data antemortem, dan kompetensi sumber daya manusia, serta faktor teknis berupa keterbatasan sarana, teknologi, basis data, dan komunikasi lintas sektor.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam identifikasi jenazah yang tidak dikenal telah memiliki dasar hukum dan dilaksanakan oleh berbagai instansi, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi, khususnya dalam kondisi non-bencana. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan dan penguatan mekanisme lintas sektor melalui peraturan pelaksana, pedoman teknis, serta SOP yang memperjelas kewenangan, koordinasi, pengelolaan data identifikasi, pembiayaan, dan tindak lanjut administrasi terhadap jenazah yang belum teridentifikasi.

Kata kunci: tanggung jawab pemerintah, identifikasi jenazah, jenazah tidak dikenal, pelayanan publik, administrasi kematian.

ABSTRACT

The identification of unidentified deceased persons is an important component in fulfilling the right to identity and legal certainty for families, as well as in ensuring the provision of public services by the government. The process involves various institutions with different authorities, thereby requiring an adequate legal framework, effective coordination, and an integrated service mechanism. This study aims to analyze the regulation of government responsibility for the identification of unidentified deceased persons, its implementation, and the factors affecting the process. This research employs a socio-legal juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through a literature review and interviews with parties involved in the identification of deceased persons and death administration processes.

The results show that the regulation of government responsibility for the identification of unidentified deceased persons is dispersed across various laws and regulations concerning human rights, health, criminal law and criminal procedural law, population administration, and public services. The development of the regulatory framework through Presidential Regulation Number 13 of 2026 on Health Management has strengthened the framework for integrated health management and the allocation of responsibilities in disaster situations, including the identification of deceased disaster victims. However, regulatory fragmentation and a regulatory gap remain, particularly regarding the identification of unidentified deceased persons in non-disaster situations. The implementation of government responsibility has been carried out by the Police, health care facilities, population administration authorities, and other relevant institutions, but continues to face challenges in cross-sectoral coordination and the continuity of the identification process through the completion of death administration. The factors affecting the identification process include juridical factors, namely regulatory fragmentation and regulatory gaps; social factors, including limited public understanding, family circumstances, the availability of ante-mortem data, and human resource competencies; and technical factors, including limitations in infrastructure, technology, identification databases, and cross-sectoral communication.

This study concludes that government responsibility for the identification of unidentified deceased persons has a legal basis and is implemented by various institutions, but has not yet been fully integrated, particularly in non-disaster situations. Therefore, harmonization of regulations and strengthening of cross-sectoral mechanisms are required through implementing regulations, technical guidelines, and standard operating procedures that clearly define authorities, coordination mechanisms, identification data management, financing, and administrative follow-up for deceased persons whose identities remain unidentified.

Keywords: *government responsibility, deceased person identification, unidentified deceased persons, public services, death administration.*